

DAFTAR PUSTAKA

At-Tanzil: Al-Qur'an dan Terjemahanya Juz 1 s/d 30. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012.

BUKU

Akbar, Patrialis. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT Radja Grafindo Persada, 2018.

Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2018.

Atmadja, I Dewa Gede, dan I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir: Aqidah-Syari'ah-Manhaj Jilid 4 (Juz 7-8)*. Jakarta: Gema Insani, 2016.

Basri, Helmi. *Ushul Fiqh Terapan: Urgensi dan Aplikasi Kaidah Ushul dalam Istinbat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021).

Bima, Iswarta. *Revolusi Mental: Pencegahan-Pencegahan Korupsi*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019.

Chandranegara, Ibnu Sina. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Dahlan, Abdurahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.

Djazuli, Ahmad. *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2018.

———. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019).

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group, 2018.

- Ganarsih, Yenti. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Depok: PT Radjagrafindo Persada, 2017.
- Hartono. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hendri. *Model Administrasi PATK*. Yogyakarta: Calpulnis, 2016.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Jilid 3 Juz 7-8-9* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2007).
- Indonesia, Tim Penyusun Mahkamah Konstitusi Republik. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.
- Indroharto. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Irman, Tubagus. *Money Laundry: Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Isharyanto. *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*. Yogyakarta: Penerbit WR, 2016.
- Isra, Saldi. *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Izomiddin. *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: IDEA Press, 2014.
- Jahja, Juni Sjfrien. *Melawan Money Laundering: Mengenal, Melawan, dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Visimedia, 2012.
- Kusdarini, Eny. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Yogyakarta: UNY Press, 2011.
- Kusuma, Mahendra. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Palembang: CV Amanah, 2017.

- Manan, Bagir. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Seminar Nasional Fakultas Hukum UNPAD.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno, dan Pitlo. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008.
- Mukhammad, Bahir. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.
- Musadad, Ahmad, dan Khoirun Nasik. *Ushul Fiqh I: Metodologi Istinbat Hukum Ekonomi dan Bisnis Syari'ah*. Malang: Literasi Nusantara, 2021.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Nurhayati, dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Depok: Prenada Media Group, 2017.
- Panjaitan, Basaria. *Mengungkap Jaringan Kejahatan Transnasional*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2011.
- Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Depok: Kencana, 2017.
- Sadi Is, Muhamad, dan Kun Budianto. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Saebeni, Beni Ahmad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Santoso, Aris Prio Agus. *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023).
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

- Setiadi, Edi, dan Kristiani. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakkan Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sirait, T. Mangaranap. *Hukum Pidana Khusus Dalam Teori Dan Penegakannya*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Sirajudin dan Winardi. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2015.
- Siregar, Syofian. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- . *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soeroso. *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sofyan, Andi Muhammad, dan Abdul Asis. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Sudrajat, Tedi Sudrajat. *Hukum Birokrasi Pemerintahan: Kewenangan dan Jabatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Sutedi, Adrian. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- Syakir, Syaikh Ahmad. *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Syauke, Amalia, Melanie Pita Lestari, dan Luqmanul Hakim. *Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023.

- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simajuntak, dan Markus Y. Hage. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2019.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Ubaedillah, Achmad. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Pancasila, Demokrasi, & Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Waluyo, Bambang. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Wijayanti, Daru. *Membangun Masa Depan Indonesia Bebas Korupsi*. Yogyakarta: Indoliterasi, 2019.
- Yurizal. *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Di Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative, 2017.
- Zahrah, Muhamad Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2019.
- Zamakhsyari. *Teori-Teori Hukum Islam: Dalam Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 15/PUU-XIX/2021.

Ringkasan Permohonan Perkara pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021

TESIS

Arihan, Teddy. “Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (Tindak Pidana Pencucian Uang) Yang Tindak Pidana Asal Dari Tindak Pidana Kehutanan.” *Tesis*, Universitas Andalas Padang, 2020. Diakses pada 05 Mei 2024. <http://scholar.unand.ac.id/69714/>.

Idhor, Mohammad. “Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Terkait Tindak Pidana Pembalakan Liar.” *Tesis*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2021. Diakses pada 05 Mei 2024. <http://repository.untag-sby.ac.id/11588/>.

JURNAL

Ashady, Suheflihusnaini, dkk. “Pengembalian Kerugian Negara Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Metode Parallel Investigation.” *Jurnal Rectum* 5, no. 2 (Mei 2023): 137-144. Diakses pada 07 Mei 2024. <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3283>

- Barnas, Melza Debbyana. "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 97/PK/PID.SUS/2019)." *Jurnal Verstek: Jurnal Hukum Acara* 10, no. 2 (-):409-417. Diakses pada 21 Januari 2024. <https://doi.org/10.20961/jv.v10i2.67693>
- Firdaus. "Eksistensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Struktur Pemerintahan Daerah." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 1 (2013): 148-158. Diakses pada 11 Mei 2024, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.1.163>
- Fitrah, Farrel Alanda, Agus Takariawan, dan Zainal Muttaqin. "Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana Perpajakan Di Indonesia." *SIGn Jurnal Hukum* 3, no. 1 (April-September 2021):001-025. Diakses pada 17 November 2023. <https://doi.org/10.37276/sjh.v3i1.107>.
- Hairi, Prianter Jaya. "Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan PPNS dalam Penyidikan TPPU dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum." *Jurnal Negara Hukum: Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI* 12, no. 2 (November 2021):161-179. Diakses pada 10 Mei 2024. <https://doi.org/10.22212/jnh.v12i2.2358>
- Jafar, Wahyu Abdul. "BPJS Kesehatan Syari'ah (Mengagas Prinsip-Prinsip BPJS Kesehatan Perspektif *Saddu Dazri'ah*." *Jurnal al-Istinbath* 2, no. 2 (Desember 2017):150-176. Diakses pada 05 November 2023. <http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v2i2.242>
- Kaifa, Rifka Putri. "Praperadilan Dan Prosedur Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil." *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* 2, no. 1 (April 2021):52-72. Diakses pada 17 November 2023. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i1.11>
- Ketaren, Siti Maimana Sari, dkk. "Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan Dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan." *USU Law Journal* 2, no.2 (November 2013):57-75. Diakses pada 17 November 2023. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/36589>
- Kusuma, Made Adi, dan Ni Ketut Supasti Darmawan. "Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (Februari 2013):1-5. Diakses pada 21 November 2023. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/4675>

- Maizaroh, Muthi'ah, Muh. Fikran Sena, dan Khulaifi Hamdani. "Model Ideal Pararel Investigation Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pasca Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021." *AML/CFT Journal* 1, no. 1 (Desember 2022): 1-14. Diakses pada 07 Mei 2024. <https://doi.org/10.59593/amlcft.2022.v1i1.20>
- Manik, Jeanne Darc Noviyanti. "Koordinasi Penyidik Polri Dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam." *Jurnal Hukum Prioris* 6, No. 3 (Februari 2018):287-30. Diakses pada 10 Mei 2024. <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/prioris/article/view/3181/3066>
- Mastur dan Woro Winandi. "Kewenangan PPNS dalam Penyidikan Tindak Pidana *Money Laundering* Terkait Pasca Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Mimbar Keadilan* 15, no. 2 (Desember 2022):164–179. Diakses pada 25 November 2023. <https://media.neliti.com/media/publications/516785-none-6e792686.pdf>
- Muhajirin. "Implementasi *Sadd Al-Dzari'ah* Dalam Akad Muamalah." *Jurnal Tatar Pasundan* 14, no. 1 (2020):87-99. Diakses pada 06 Maret 2024. <https://doi.org/10.38075/tp.v14i1.39>
- Mutawal, Muhammad. "Epistemologi Hukum Islam Dan Sistem Peradilan Dalam Islam." *Jurnal Schemata* 6, no. 2 (Desember 2017) : 141-154. Diakses pada 02 Maret 2024, <https://doi.org/10.20414/schemata.v6i2.841>
- Nanda, Novira Fazri, Muhammad Rasuli, dan Taufeni Taufik. "Pengaruh APIP, BPK, dan DPRD dalam Penegakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik (*Good Government Governance*) dengan Pengendalian Internal sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Provinsi Riau)." *Jurnal Ekonomi* 27, no. 3 (2019):254-266. Diakses pada 23 Maret 2024. <http://dx.doi.org/10.31258/je.27.3.p.254-266>
- Nasution, Abdul Hayy, dan I Gusti Ayu Anita Lakshana. "Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 Ayat (1) Jo. Pasal 6 Ayat (1) dan Undang-Undang No.19 Tahun 2019 tentang Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 1 Ayat (6) dalam Proses Peradilan Pidana Indonesia." *Journal of Social Studies* 3, no. 2 (Agustus 2022):92-101. Diakses pada 17 November 2023. <https://doi.org/10.37010/fcs.v3i2.830>

- Nurlaily, Hasrina. “Konstruksi Hukum Terhadap Kewajiban Koordinasi PPNS Kepada Kepolisian Dalam Menyidik Pencucian Uang.” *Jurnal AML/CFT* 01, vol. 02 (Juni 2023): 167-182. Diakses pada 11 Mei 2024. <https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v1i2.58>
- Qamar, Nurul. “Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 1, no. 1 (November 2012):1-15. Diakses pada 23 Februari 2024. <https://jk.ejournal.unri.ac.id/index.php/JK/article/view/2081>
- Ramdan, Ajie. “Problematika *Legal Standing* Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (Mei 2016):737-758. Diakses pada 21 Januari 2024. <https://doi.org/10.31078/jk1147>.
- Satria, Hariman. “Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik.” *Jurnal Antikorupsi* 6, no. 2 (2020):169-186. Diakses pada 25 Maret 2024. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.660>
- Sedarmayanti. “Penerapan *Good Governance* dalam Organisasi Pemerintahan.” *Jurnal Wacana Kinerja* 6, no. 3 (2003):1-16. Diakses pada 22 Maret 2024. <http://dx.doi.org/10.31845/jwk.v6i3.520>
- Setyono, Joko. “*Good Governance* Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma).” *Jurnal Muqtasid* 6, no. 1 (2015):25-40. Diakses pada 22 Maret 2024. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.25-40>
- Siregar, Edward Fernando, Helvis, dan Markoni. “Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) First Travel.” *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 11 (November 2021):1561–1573. Diakses pada 20 November 2022. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i11.454>
- Sultan, Lomba. “Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia.” *Jurnal Al-Ulum* 13, No. 2 (Desember 2013):435-452. Diakses pada 02 Maret 2024. <https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/195>
- Suryani, Ita. “Penanaman Nilai Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi.” *Jurnal Visi Komunikasi* 12, no. 2 (2013):308-322. Diakses pada 25 Maret 2024. <https://dx.doi.org/10.22441/visikom.v12i2.413>
- Ubaidillah, M. Hasan. “Kontribusi Hukum Islam dalam Mewujudkan *Good Governance* di Indonesia.” *Jurnal Al-Qānūn* 11, no. 1 (2008):112-

141. Diakses pada 22 Maret 2024.
<https://doi.org/10.15642/alqanun.2008.11.1%20Juni.112-141>

Yazwardi dan Kiki Mikail. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilu: Studi Kasus Pemilihan Walikota Palembang Tahun 2013.” *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam* 15, no. 2 (April 2016):69-106. Diakses pada 22 November 2023.
<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tamaddun/article/view/451>.

Yuharfiandri dan Nur Hikmah Damayanti Sunawir. “Analisis Penanganan Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 Ditinjau dari Penjelasan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan *Parallel Investigation Approach*.” *Padjadjaran Law Review* 10, no. 2 (Desember 2022):-.. Diakses pada 10 Mei 2024.
<https://doi.org/10.56895/plr.v10i2.1051>

Yunus, Nur Rohim. “Menciptakan *Good And Clean Government* Berbasis Syariah Islamiyah Dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia.” *Jurnal Nur El-Islam* 3, no. 1 (2016):143-175, Diakses pada 22 Maret 2024,
<https://www.neliti.com/id/publications/226465/menciptakan-good-and-clean-government-berbasis-syariah-islamiyah-dalam-tatakelol#cite>

WEBSITE:

Hasanah, Sovia. (2023). *Pengertian Konstitusional Bersyarat dan Inkonstitusional Bersyarat* [Online]. Dikutip dari Website Hukum Online.com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-konstitusional-bersyarat-dan-inkonstitusional-bersyarat-lt581c0c98aa2ee> [22 Desember 2023]

Hukumonline, Tim. (2024). Klasifikasi Amar Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata. Dikutip dari Website Hukum Online.com [Online]. <https://www.hukumonline.com/berita/a/amar-putusan-lt61ca7d7890a08/> [23 Januari 2024]

Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik. (2023). *Sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi* [Online]. Dikutip dari Website Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11775> [15 Desember 2023]

- Isabela, Monica Ayu Caesar, dan Nibras Nada Nailufar. (2024). Pengertian Good Governance Menurut Ahli [Online]. Dikutip dari Website Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/01000071/pengertian-good-governance-menurut-ahli> [22 Maret 2024]
- Muslim, Fitrihadi. (2024). Rencana Aksi Optimalisasi Penanganan TPPU Pasca Putusan MK Nomor 15/PUU/XIx/2021 [Online]. Dikutip dari Website PPAATK RI (2024). https://auriga.or.id/resource/reference/fithriadi_muslim-rencana_aksi_optimalisasi_penanganan_tppu_pasca_putusan_mk_nomor_15-puu-xix-2021.pdf
- Oktavira, Bernadetha Aurelia. (2023). Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 dan UU MK [Online]. Dikutip dari Website Hukum Online.com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-mahkamah-konstitusi-1t628b76075befa> [15 Desember 2023]
- Purnamasari, Dian Dewi. (2024). RUU Perampasan Aset Diyakini Akan Efektifkan Pemberantasan TPPU [Online]. Dikutip dari Website Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/11/08/ruu-perampasan-aset-diyakini-akan-efektifkan-pemberantasan-tppu> [05 Juni 2024]
- Sahbani, Agus. (2024). Ada Kemungkinan Korwas Akan Dihapus [Online]. Dikutip dari Website Hukum Online.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-kemungkinan-korwas-akan-dihapus-1t555edcc8d0f1c/> [10 Mei 2024]
- Sofyan, Andi Muhammad. (2024). Beban Pembuktian Terbalik Dan Mencegah Penyalahgunaan Wewenang PPNS Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang [Online]. Dikutip dari Website Auriga Nusantara.or.id. https://auriga.or.id/resource/reference/prof.dr.andi_muhammad_sofyan.s.h..m.h.-beban_pembuktian_terbalik_dan_mencegah_penyalahgunaan_wewenang_ppns_dalam_penyidikan_tindak_pidana_pencucian_uang.pdf [11 Mei 2024]
- Wahyuni, Willa. (2024). Perbedaan Posita dan Petitum dalam Isi Gugatan [Online]. Dikutip dari Website Hukum Online.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-posita-dan-petitum-dalam-isi-gugatan-1t62ea9b18364e4/> [20 Januari 2024]
- Waqgas, Abdul. (2024). Gakkum LHK Tangkap Petinggi Perusahaan Tambang Nikel Ilegal di Kolaka Sultra [Online]. Dikutip dari Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan Republik Indonesia.

<https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7503/gakkum-lhk-tangkap-petinggi-perusahaan-tambang-nikel-ilegal-di-kolaka-sultra> [12 Mei 2024]

Yozami, M. Agus. (2024). Kewenangan OJK Penyidik Tunggal Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan Dinilai Tidak Tepat [Online]. Dikutip dari Website **Hukum** Online.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kewenangan-ojk-penyidik-tunggal-tindak-pidana-sektor-jasa-keuangan-dinilai-tidak-tepat-lt63caaa045973a/> [10 Mei 2024]